

**KORAN
DIGITAL**

**PERTAMA
& GRATIS**

KORAN SULSEL

TERPERCAYA & TERDEPAN **.COM**

EDISI KAMIS

11 SEPTEMBER 2025

YUSRIL IHZA MAHENDRA RESPONS GUGATAN RP800 MILIAR TERHADAP POLDA SULSEL



**MAKASSAR SIAPKAN JALUR
ALTERNATIF BARUGA-LEIMENA,
SOLUSI ATASI MACET TIMUR KOTA
BACA HALAMAN ... 4**



YUSRIL IHZA MAHENDRA RESPONS GUGATAN RP 800 MILIAR TERHADAP POLDA SULSEL

MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Hukum HAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi langkah hukum warga yang menggugat Polda Sulawesi Selatan secara perdata senilai Rp800 miliar di Pengadilan Negeri Makassar.

“Kita persilahkan mereka melakukan gugatan perdata dalam hal ini yang mereka lakukan. Dan tentu, kalau digugat pasti ada tergugatnya. Untuk tergugatnya tentu kami akan memberikan arahan kepada Polda menjawab gugatan itu,” ujar Yusril kepada wartawan usai mengunjungi para tersangka kerusuhan demonstrasi di Mapolda Sulsel, Rabu (10/9/2025).

Menurut Yusril, gugatan perdata yang diajukan nantinya akan melewati proses media-

si selama 40 hari. Jika tercapai kesepakatan, maka perkara selesai, tetapi jika tidak akan dilanjutkan ke persidangan. “Karena ini memang gugatan perdata, ujung-ujungnya adalah saksinya, ganti rugi, dan sebagainya. Kita menghormati hak setiap orang untuk mengambil upaya hukum,” paparnya.

Yusril juga menegaskan, para tersangka yang ditahan di Direktorat Tahti Polda Sulsel berhak mengajukan praperadilan jika merasa proses penangkapan tidak sesuai prosedur, misalnya tanpa dua alat bukti yang cukup atau terjadi salah tangkap. “Polisi juga akan menghadapi gugatan itu di pengadilan negeri nantinya. Biarkan mekanisme hukum berjalan secara fair. Pemerintah siap menerima risiko kalau sekiranya dikalahkan,” tegasnya.

Sebelumnya, gugatan Rp800 miliar dilayangkan oleh Muhammad Sulhadrianto Agus melalui kuasa hukumnya, Muallim Bahar. Gugatan resmi diajukan ke PN Makassar pada Senin (8/9) terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh Polda Sulsel saat pengamanan kerusuhan yang berujung pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8) malam hingga merembet ke Kantor DPRD Provinsi pada Sabtu (30/8) dini hari.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyatakan kepolisian siap menghadapi gugatan. “Kita hargai upaya itu karena semua punya hak. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kepolisian sudah berusaha maksimal dan dengan penuh pertimbangan,” ujarnya. (ant/KS)

YUSRIL PASTIKAN TERSANGKA PEMBAKARAN DPRD MAKASSAR TIDAK TERINDIKASI MAKAR

MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa para terduga pelaku pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel tidak terindikasi makar.

“Mereka semua ini masih sedang didalami peran-perannya dan polisi masih melakukan penyelidikan serta pendalaman. Yang pasti, mereka tidak terindikasi makar,” ujar Yusril usai menemui para tersangka di Mapolda Sulsel, Rabu (10/9/2025).

Ia menjelaskan, seluruh kasus yang menjerat para tersangka berkaitan dengan tindak pi-

dana umum dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Aparat penegak hukum, kata dia, tetap profesional dan menerapkan pasal sesuai peran masing-masing tersangka. “Melihat bukti awal, tidak ada pasal makar yang bisa diterapkan karena memang mereka tidak terindikasi itu,” tegasnya.

Polisi hingga kini telah mengamankan 42 orang yang diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis. Dari jumlah tersebut, 27 orang ditahan di Polrestabes Makassar, 13 orang di Polda Sulsel, dan dua lainnya di Kota Palopo. “Total 42 orang, 13 di antaranya sudah kita temui langsung di

sel tahanan Polda Sulsel, sisanya ada di Polrestabes Makassar dan Kota Palopo,” jelas Yusril.

Kerusuhan tersebut terjadi pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari. Massa membakar Kantor DPRD Makassar, Kantor DPRD Sulsel, dan dua pos polisi. Sejumlah fasilitas umum juga turut dirusak.

Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa, empat orang meninggal dunia. Tiga di antaranya akibat kebakaran di Kantor DPRD Makassar, sementara seorang pengemudi ojek online tewas dikeroyok massa karena dikira intelijen. Selain itu, sejumlah orang mengalami luka berat dan masih dirawat. (ant/KS)



Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra usai menemui para terduga pelaku pembakaran kantor DPRD Makassar dan Sulsel di sel tahanan Mapolda Sulsel, Rabu (10/9/2025)

MAKASSAR SIAPKAN JALUR ALTERNATIF BARUGA-LEIMENA, SOLUSI ATASI MACET TIMUR KOTA

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Kalla Group menyiapkan jalur alternatif baru melalui kawasan Baruga Antang, Kecamatan Manggala, untuk mengurangi kemacetan di wilayah timur kota. Jalur ini dirancang sebagai penghubung strategis antara Kecamatan Manggala dan Tamalanrea, sekaligus membuka akses dari Baruga Antang menuju Jalan Dr Leimena hingga poros Jalan Perintis Kemerdekaan.

"Jalur ini menjadi solusi bagi warga yang tinggal di Manggala dan wilayah timur kota. Mau tidak mau, suka atau tidak, kita memang harus mencari jalan alternatif karena sekarang ini semua akses sudah macet," ujar Wali Kota Makassar, Munafri Ari-

fuddin, saat meninjau lokasi rencana pembangunan di Bukit Baruga Antang, Rabu (10/9/2025).

Rencana pembangunan dimulai dengan survei lapangan yang dipimpin langsung Wali Kota bersama jajaran terkait. Dari kawasan hulu Bukit Baruga hingga Jembatan Leimena, ia meninjau peta trase yang akan ditembus jalur baru tersebut.

Trase jalan baru akan melintasi aliran Sungai Tello, tepatnya dari kompleks Baruga dekat area driving range golf, lalu menyusuri sungai sepanjang 1,5 kilometer hingga tembus ke Jalan Leimena. Jalan dengan lebar sekitar 30 meter itu tidak hanya difungsikan sebagai akses lalu lintas, tetapi juga sebagai kawasan

penunjang ekonomi masyarakat.

Sepanjang jalur yang dikerjakan akhir 2025, akan dibangun sentra kuliner dan pasar wisata di tepian sungai. Selain itu, jalur baru diproyeksikan tembus hingga kawasan BTP dengan panjang total sekitar 5 kilometer, sehingga menghadirkan akses lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

Dengan pembebasan lahan di sejumlah titik strategis, pembangunan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Munafri menambahkan, jalur alternatif juga akan dipadukan dengan sistem penanggulangan banjir agar memberi manfaat ganda bagi kota. (ant/KS)



Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama pihak Kalla Group saat meninjau lokasi rencana pembangunan jalan alternatif di Makassar, Rabu (10/09/2025).



Foto bersama warga Banta-bantaeng bersama pihak Poltekkes Makassar.

POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR EDUKASI WARGA BANTA-BANTAENG SOAL SANITASI DAN LIMBAH

MAKASSAR – Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Makassar menggelar edukasi kesehatan lingkungan bagi warga Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar, Rabu (10/9/2025). Fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman terkait sanitasi, kebersihan makanan, serta pengelolaan limbah rumah tangga.

“Edukasi ini penting untuk mencegah penyakit dari dapur hingga limbah, dan ini bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengabmas),” kata Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar, Syamsudin.

Edukasi diberikan langsung oleh dosen dan mahasiswa yang turun ke lapangan. Mereka tak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menghadirkan solusi praktis yang dapat diterapkan masyarakat sehari-hari. “Kegiatan ini bukan sekadar sarana transfer ilmu, tetapi juga kesempatan membangun kedekatan dengan masyarakat,” ujarnya.

Pada sesi edukasi hari kedua, peserta mendapat dua materi utama. Pertama, prinsip sanitasi makanan dan pencegahan infeksi *Salmonella* sp., bakteri penyebab demam tifoid. Materi ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan saat mengolah makanan agar terhindar

dari kontaminasi berbahaya. Kedua, bahaya penyakit akibat limbah rumah tangga, terutama dampaknya bagi kesehatan ibu dan anak.

Melalui kegiatan ini, Poltekkes Kemenkes Makassar menegaskan komitmennya untuk hadir bersama masyarakat, memperkuat kemitraan dengan pemerintah, serta mendorong terciptanya lingkungan sehat dan berkelanjutan.

Lurah Banta-Bantaeng, Adi Mulyadi Jacub, mengapresiasi kontribusi perguruan tinggi tersebut. “Hal itu penting untuk membantu pengelolaan limbah sekaligus menjaga lingkungan,” ujarnya. (ant/KS)

KEJATI SULSEL DAN BSI TEKEN KERJA SAMA PENDAMPINGAN HUKUM PERBANKAN

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyatakan siap mendampingi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Region X Makassar dalam penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) serta pelayanan perbankan. Kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Kejati Sulsel, Rabu (10/9/2025).

Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, mengapresiasi kepercayaan BSI yang menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum perbankan. "Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan BSI Area Makassar. Layanan hukum ini diharapkan dapat membantu permasalahan perbankan yang dihadapi," ujarnya.

Ia menjelaskan, peran JPN berlandaskan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang Datun. Dengan dasar tersebut, JPN memiliki fungsi strategis, khususnya dalam penanganan kredit macet serta upaya pencegahan fraud. "Kerja sama ini untuk menghindarkan teman-teman di BSI dari fraud melalui upaya pencegahan yang biayanya murah," tambah Agus.

Regional CEO BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menyampaikan apresiasinya atas sinergi dengan Kejaksaan. Menurutnya, kerja sama ini penting mengingat berbagai tantangan yang dihadapi sejak pendirian BSI empat tahun lalu dalam

pengembangan ekonomi syariah. "Kami mohon masukan dari Kejati Sulsel sebagai Ketua Pelaksana Satgas Percepatan Investasi," katanya.

Sukma menegaskan, manajemen BSI akan terus mendukung Kejati Sulsel dalam peran Satgas Percepatan Investasi di Sulsel. Dukungan itu diwujudkan melalui kerja sama pendampingan hukum dan penguatan peran perbankan dalam menggerakkan potensi ekonomi daerah. "Kami berharap dengan berbagai program pengembangan potensi daerah, BSI bisa meningkatkan investasi dan mendukung Satgas dari segi perbankan," tuturnya.

Penandatanganan PKS disaksikan Wakil Kepala Kejati Sulsel Robert M. Tacoy, para asisten, koordinator, serta JPN lingkup Kejati Sulsel. (ant/KS)





Sejumlah pelaku pengerusakan dan pembakaran kantor DPRD pascademo berujung kerusuhan digiring polisi saat rilis pengungkapan kasus di Mapolda Sulsel,

TIGA PELAKU Pengeroyokan Ojol Dandi di MAKASSAR DITANGKAP POLISI

MAKASSAR – Kepolisian menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pengeroyokan pengemudi ojek daring (Ojol) Grab, Rusdamdiansyah alias Dandi (26), yang meninggal dunia usai dianiaya massa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada 29 Agustus 2025.

“Untuk pelaku penganiayaan Ojol ini (Dandi) sekarang sudah diamankan tiga orang, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, di Mapolda Sulsel, Rabu (10/9/2025).

Didik enggan merinci identitas maupun inisial para tersangka, termasuk apakah mereka berstatus mahasiswa atau

masyarakat umum. Ia hanya memastikan penyidik masih melakukan penyelidikan lanjutan sehingga jumlah tersangka berpotensi bertambah. “Ini masih ada pengembangan lagi. Nanti saya cek datanya. Intinya tiga orang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari tiga pelaku tersebut terdapat seorang anak di bawah umur yang masih diperiksa lebih lanjut. “Termasuk yang penganiayaan itu ada di bawah umur,” katanya.

Secara keseluruhan, kepolisian telah menahan 40 orang terkait kerusuhan yang berujung pembakaran dua kantor DPRD serta aksi perusakan dan penjarahan. Dari jumlah itu, 26 orang ditahan

di Tahti Polrestabes Makassar, 14 orang di Tahti Polda Sulsel, serta dua orang lainnya terkait kasus perusakan Kantor DPRD Kota Palopo.

Kasus pengeroyokan Dandi bermula ketika korban yang sedang mengambil gambar di sekitar lokasi aksi di depan Kampus Universitas Bosowa dikira sebagai intelijen. Massa kemudian menganiayanya hingga kritis. Dandi sempat dilarikan ke RS Ibnu Sina sebelum dirujuk ke RS Kemenkes RI Otak Jantung dan Kanker (OJK) di kawasan CPI, Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Meski sempat menjalani operasi di bagian kepala, nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia. (ant/KS)

GRATIS
TANPA IURAN

E-PAPER

koraNusantara
www.koranusantara.com

EDISI KAMIS
11 SEP 2025



KPK TAHAN DAYANG DONNA, DALAMI PRAKTIK SUAP BERULANG DI KALTIM

BACA HALAMAN 2



**BANJIR TERJANG BALI, TIM
SAR LANJUTKAN PENCARIAN
KORBAN HILANG**



Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiarez Tania (kiri) selaku tersangka kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim tahun anggaran 2013-2018, saat berjalan menuju mobil tahanan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

KPK TAHAN DAYANG DONNA, DALAM PRAKTIK SUAP BERULANG DI KALTIM

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiarez Tania (DDW) meminta uang suap di luar kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim tahun anggaran 2013-2018.

"Jadi, kami sedang mendalami ya, apakah ini kejadian pertama, atau ini rangkaian kejadian, atau sudah biasa terjadi," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Asep menjelaskan pendalaman itu dilakukan sebab Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP dispons oleh ayahnya, yakni Awang Faroek Ishak (AFI) selaku Gubernur Kaltim pada saat itu.

"Seharusnya kan, kalau baru pertama ya mungkin langsung ke orang tuanya disampaikan seperti itu, atau langsung ke pe-

jabatnya dulu, tetapi kan kondisi-kondisi ini seperti yang sudah lumrah. Ini yang sedang kami dalami," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan permintaan uang suap oleh Dayang Donna sebesar Rp3,5 miliar dalam kasus tersebut merupakan patokan harga suka-suka.

"Uang-uang tersebut ini ilegal. Artinya, tidak ada panduannya atau tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang yang masuk ke kas negara. Ya, makanya ini bentuknya suap, penyuapan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan suap pemberian IUP di Kaltim, dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni berinisial AFI, DDW, dan ROC, yakni pada 19 September 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI), Ketua Umum Kadin Kaltim

Dayang Donna Walfiarez Tania (DDW), dan pengusaha Rudy Ong Chandra (ROC). Namun, Awang Faroek telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024.

KPK kemudian pada 25 Agustus 2025, mengonfirmasi identitas para tersangka tersebut, serta mengumumkan penahanan dan peran Rudy Ong Chandra.

Pada 10 September 2025, KPK mengumumkan telah menahan Dayang Donna sejak 9 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur.

Dayang Donna dinilai berperan meminta harga penebusan perpanjangan enam IUP eksplorasi milik perusahaan Rudy Ong Chandra (ROC) sebesar Rp3,5 miliar.

Setelah mendapatkan uang tersebut, Dayang Donna mengutus pramusiwinya berinisial IJ untuk mengirimkan SK enam IUP milik perusahaan Rudy Ong.

Dayang Donna juga kemudian meminta biaya tambahan kepada Rudy Ong melalui perantara, namun tidak ditanggapi. (ANT/KN)



Basarnas Bali dan tim SAR gabungan evakuasi warga Denpasar dampak banjir, Denpasar, Rabu 10/9/2025. ANTARA/HO-Basarnas)

BANJIR TERJANG BALI, TIM SAR LANJUTKAN PENCARIAN KORBAN HILANG

DENPASAR - Tim SAR gabungan mengevakuasi 142 orang dalam kondisi selamat dan tiga orang meninggal dunia akibat banjir di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya di Denpasar, Rabu, mengatakan selain masyarakat setempat, tim SAR gabungan juga mengevakuasi wisatawan sejak pagi meski sempat terkendala karena banyak akses jalan tergenang banjir sehingga sulit dilintasi.

Adapun proses evakuasi pertama kali dilakukan tim SAR gabungan pada pukul 07.30 Wita di kawasan Kampung Jawa Jalan Ahmad Yani Denpasar terhadap dua orang dewasa dan satu anak-anak.

"Pukul 08.00 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi 30 orang dewasa dalam keadaan selamat di Lingkungan Wiraraja Ubung Kaja Denpasar," katanya.

Selanjutnya, pukul 09.30 Wita

mereka kembali mengevakuasi lima orang dewasa dan dua balita dalam keadaan selamat di Jalan Pulau Misol, Denpasar.

Pada pukul 10.30 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi dalam jumlah besar, yaitu 53 orang dewasa, 17 anak dan 11 orang balita di Jalan Pura Demak Denpasar.

Ia menjelaskan, korban meninggal dunia pertama ditemukan pukul 12.30 Wita di Jalan Hasanudin Denpasar yang langsung dievakuasi bersama dua orang lainnya yang selamat.

Kemudian, pukul 14.00 tim kembali menemukan satu korban meninggal dunia di Pasar Kumbasari, tak jauh dari lokasi sebelumnya bersama satu lainnya yang dievakuasi dalam kondisi selamat.

"Pukul 16.20 Wita tim SAR kembali mengevakuasi satu orang dalam keadaan selamat, satu orang dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Cokroaminoto Gang Anggrek Denpasar," kata Nyoman Sidakarya.

Pada pukul 16.30 Wita kemudian tim SAR gabungan mulai mengevakuasi wisman di kawasan-kawasan pariwisata di Kabupaten Badung.

Tim SAR gabungan mengevakuasi tiga orang WNA Arab, lima orang WNA Australia, empat orang WNA Russia, tiga orang WNA Korea Selatan, bersama tiga orang WNI dalam keadaan selamat di Jalan Dewi Sri Kuta, Badung.

"WNA semua terevakuasi ya langsung keluar hotel dan pulang diantar agen perjalanannya untuk ke bandara," sambungnya.

Dia menyampaikan, hingga malam ini total enam korban masih dalam pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi.

Adapun alat yang digunakan untuk evakuasi hari ini adalah sembilan unit perahu karet, dua unit kano, empat unit ambulans, satu unit mobil penyelamatan, satu truk penyelamatan, dua truk angkut personel dan peralatan SAR air. (ANT/KN)



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Kamis (15/5/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

KEPONAKAN PRABOWO, RAHAYU SARASWATI MUNDUR DARI DPR

JAKARTA - Keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI, setelah sebelumnya menyatakan mengundurkan diri.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Menurut dia, partainya bakal memproses pengunduran diri Saraswati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Sementara menunggu proses, maka saudari Sara (sapaan akrab Rahayu Saraswati) akan dinonaktifkan dari DPR," kata Bam-

bang dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Dia menjelaskan proses administratif terkait keputusan Sara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

"Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan," kata dia.

Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi

VII DPR RI menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI karena memahami adaungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

"Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra," kata dia dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9/2025). (ANT/KN)



Presiden RI Prabowo Subianto menelepon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet)

PASCA SERANGAN ISRAEL KE DOHA, PRESIDEN PRABOWO BICARA DENGAN EMIR QATAR

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto, Rabu, berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani melalui telepon menanyakan kondisi terkini pascaserangan Israel ke Doha, Qatar, pada Selasa (9/9/2025).

Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu, Teddy mengatakan serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, serta ancaman besar terhadap kea-

manan dan perdamaian kawasan.

"Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan," kata Teddy.

Seskab Teddy mengatakan Indonesia menegaskan kembali solidaritas terhadap pemerintah dan rakyat Qatar serta menekankan komitmen untuk mendukung semua upaya diplomatis dalam rangka mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara.

Israel melancarkan serangan ke ibu kota Qatar, Doha, Selasa (9/9), dengan alasan melak-

sanakan operasi untuk menyinkronkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar.

Israel menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi itu dan menyatakan bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.

Kementerian Luar Negeri Qatar dalam pernyataan resminya mengecam keras serangan Israel terhadap gedung-gedung permukiman di Doha.

Menurut otoritas Qatar, serangan itu merupakan tindakan pengecut, yang mengancam warga sipil dan warga asing di Qatar. (ANT/KN)



Petugas perbankan menunjukkan uang pecahan Rupiah dan dolar AS. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/aa.

RUPIAH MENGUAT 12 POIN, PASAR TUNGGU KONSISTENSI KEBIJAKAN FISKAL MENKEU BARU

JAKARTA - Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.470 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.482 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.457 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.462 per dolar AS.

"Rupiah pada perdagangan Rabu, 10 September 2025, dibuka menguat di kisaran Rp16.432–Rp16.463 per dolar AS dan bahkan sempat menjadi mata uang terkuat di Asia pada awal sesi. Penguatan ini terutama dipicu oleh ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat yang menekan dolar global," ucapnya.

Rupiah juga memperoleh sentimen positif dari harapan penurunan suku bunga The Fed seiring data tenaga kerja AS yang

melemah, kendati rilis data inflasi AS malam ini berpotensi menguatkan arah sentimen global.

Meninjau sentimen dari dalam negeri, intervensi Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menenangkan volatilitas. Namun, kepercayaan pasar tetap menunggu konsistensi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

"Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan," kata Taufan.

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Menkeu terpilih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya.

Dalam jangka panjang, tantangan utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ialah upaya meningkatkan rasio pajak.

Hal itu mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia sela-

ma beberapa tahun terakhir.

Jika melihat rekam jejak, ujar Yusuf, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia kebijakan ekonomi. Namun, apa yang ditunggu oleh pasar adalah sejauh mana pengalaman Purbaya di berbagai posisi selama ini dapat benar-benar diterjemahkan untuk menjawab tantangan konkret dan menyelesaikan masalah Kemenkeu.

Apalagi, kata dia, lingkup tugas di Kemenkeu jelas berbeda karena cenderung lebih luas dan kompleks, serta menuntut kapasitas koordinasi fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan peran sebelumnya.

Menurut Yusuf, terlalu dini untuk memberikan penilaian terhadap Purbaya. Biasanya, pasar disebut akan menunggu tindak lanjut dan arah kebijakan Menkeu baru melalui proses yang tidak instan.

"Pasar akan menakar apakah kebijakan fiskal tetap dijalankan secara prudent, sekaligus menilai langkah-langkah jangka pendek, misalnya sejauh mana strategi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi," ujar Yusuf. (ANT/KN)



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

CEGAH PENYELUNDUPAN, GIBRAN TEKANKAN PENTINGNYA PERPRES SATGAS LOBSTER

BATAM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

"Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita," kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025).

Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hedi-

ati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

"Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain," kata Gibran.

Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang

memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

"Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses," ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu (10/9/2025).

Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi.

Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture. (ANT/KN)



Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

MENKEU PURBAYA PASTIKAN TIDAK ADA PEMOTONGAN TKD DI RAPBN 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI.

"Kita gak akan memotongkan lagi," kata Purbaya saat menjawab pertanyaan mengenai dana transfer ke daerah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam.

Dalam sesi jumpa pers itu, Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu Purbaya.

Dia melanjutkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan

anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik.

"Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi, limitasi sistem keuangan kita," sambung Purbaya.

Menkeu Purbaya menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI untuk melaporkan hasil rapat kerja perdana Purbaya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025) pagi, kemudian keduanya juga berdiskusi membahas RAPBN 2026.

"Angka-angka masih didiskusikan. Jadi belum putus. Tetapi, kita laporkan progress-nya seperti apa," kata Purbaya.

Menkeu Purbaya kemudian juga melaporkan usulan pemerintah terkait perubahan beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026. "Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tetapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,"

kata Purbaya.

Dalam rapat di DPR RI di Jakarta, Rabu pagi, Purbaya dan Komisi XI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp52,16 triliun.

Purbaya, dalam paparannya, menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan.

Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Kemudian, ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan. (ANT/KN)



Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Awang Indra. (Ady/MKG)

21 WARGA KUKAR JALANI SIDANG TIPIRING, DIDOMINASI PENJUAL MIRAS TANPA IZIN

TENGGARONG – Sebanyak 21 orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari total terdakwa, dua orang merupakan pedagang kaki lima (PKL), sementara 19 lainnya adalah penjual minuman beralkohol tanpa izin.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Awang Indra, mengatakan pelanggaran PKL ditemukan di Kecamatan Tenggarong. Sedangkan kasus penjualan minuman beralkohol tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Jawa, Samboja, serta Tenggarong.

“Penindakan ini kelanjutan

dari sidak beberapa waktu lalu, termasuk di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) khususnya Samboja dan Muara Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan bersama otorita IKN agar pengawasan lebih optimal,” jelasnya, Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, hingga kini izin resmi untuk usaha kafe maupun tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol belum tersedia di Kukar. “Setiap aktivitas penjualan minuman beralkohol tanpa izin dinyatakan melanggar aturan dan diharapkan penindakan ini memberikan efek jera,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tenggarong, Budi Susilo, menjelaskan sidang tipiring dilaksanakan berdasarkan pelimpahan perkara dari Satpol PP selaku Penyidik PPNS atas kuasa Penuntut Umum.

“Satpol PP memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pemeriksaan perda, termasuk pelanggaran penjualan minuman keras. Persidangan tersebut dilakukan dalam satu hari dan diputus di hari itu juga, dimana seluruh terdakwa dijatuhi pidana denda bagi yang tidak hadir. Sedangkan yang hadir dijatuhi pidana bersyarat dengan semangat restoratif justice sesuai Perma 1 Tahun 2024,” terangnya.

Budi menambahkan, terdakwa yang dijatuhi denda tetapi tidak mampu membayar akan diganti dengan pidana kurungan. Putusan hakim didasarkan pada KUHP, KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Perma 1 Tahun 2024.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Suasana panen raya di Kelurahan Mangkurawang. (Istimewa)

KUKAR KOKOHKAN POSISI LUMBUNG PANGAN KALTIM, PANEN RAYA PADI DI MANGKURAWANG JADI BUKTI

TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan perannya sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur (Kaltim), melalui panen raya padi sawah milik Gapoktan Sidodadi, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, pada Senin (8/9/2025).

Dalam sambutan bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang dibacakan oleh Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengatakan panen ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan daerah meski para petani kerap menghadapi tantangan cuaca ekstrem hingga ancaman gagal panen.

"Profesi petani adalah profesi mulia. Mereka menyediakan pangan bagi masyarakat luas, meskipun sering harus berjuang menghadapi cuaca tak menentu hingga serangan hama," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim 2024, luas panen padi di provinsi ini mencapai 57.143 hektare, dan Kukar menyumbang 26.744 hektare atau 46,80 persen. Dari sisi produksi, Kukar bahkan menyum-

bang 115,10 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 50,71 persen dari total produksi Kaltim.

Dengan kontribusi sebesar itu, Kukar diyakini bakal memegang peran strategis lebih besar saat Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi beroperasi. Diperkirakan, 4–5 juta penduduk akan bermigrasi ke wilayah IKN dan sekitarnya sehingga kebutuhan pangan akan meningkat drastis.

"Ini peluang sekaligus tantangan bagi Kukar. Kami dituntut menjadi penyangga utama pangan IKN," jelas Ahyani.

Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemkab Kukar menetapkan lima kawasan pertanian berbasis padi sawah dengan total luas 8.093 hektare, mulai dari Sebulu, Muara Kaman, Loa Kulu, Tenggarong, hingga Marangkayu.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian terus dipacu, terutama irigasi, jalan usaha tani, hingga dukungan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pemkab juga menggandeng TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk percepatan pembangunan.

"Modernisasi pertanian terus

kami dorong. Ada juga dukungan tenaga penyuluh pertanian swadaya dan akses modal tanpa agunan melalui Kredit Kukar Idaman (KKI)," kata Ahyani.

Namun ia mengakui, sejumlah kendala masih dihadapi, khususnya sistem pengairan. Sebagian besar sawah Kukar masih bergantung pada tadah hujan sehingga rawan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

"Kalau irigasi kita kuat, produktivitas bisa naik. Petani bisa menanam tiga kali setahun, dari yang sebelumnya hanya dua kali," jelasnya.

Sebagai contoh, di Kelurahan Mangkurawang terdapat 239 hektar sawah fungsional dan 200 hektar lahan potensial dengan anggota kelompok tani lebih dari 300 orang. Potensi ini akan optimal bila sistem irigasi diperbaiki.

"Jika ini tercapai, kesejahteraan petani akan meningkat. Apalagi pemerintah pusat kini sudah membuat kebijakan serapan gabah dengan harga yang lebih layak bagi petani," tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Suasana aksi di Kejari Kukar. (Ady/MKG)

DIDESAK SEGERA TUNTASKAN DUGAAN KORUPSI EKRAF, KEJARI KUKAR TEGASKAN SUDAH DALAM TAHAP PENYIDIKAN

TENGGARONG – Desakan penuntasan kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menguat. Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kukar, yang menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, pada Rabu (10/9/2025).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta kejelasan dari Kejari Kukar terkait proses hukum dugaan korupsi di bidang ekonomi kreatif Dispar. Kedua, mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat segera ditindak sesuai aturan. Ketiga, mendorong Kejari Kukar lebih aktif dalam mengusut kasus-kasus serupa di Kukar.

Koordinator aksi, M Ady, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal perkemban-

gan kasus ini. Ia menyebut, pengawasan tersebut akan dilakukan hingga ada kepastian hukum yang transparan dan jelas.

"Kami dari PMII Kutai Kartanegara akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara," katanya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kukar, Wasita Triantara, memberikan tanggapan positif atas aksi mahasiswa tersebut. Ia menyebut idealisme mahasiswa adalah bagian penting dalam kontrol sosial.

Wasita juga menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi di Dispar Kukar telah masuk tahap penyidikan. Pihaknya bahkan telah melibatkan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara.

Menurutnya, proses audit sepenuhnya menjadi kewenangan auditor. Namun, Kejari Ku-

kar berkomitmen melengkapi seluruh dokumen dan keterangan yang dibutuhkan agar penyelidikan berjalan maksimal.

Wasita mengungkapkan, koordinasi intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan sejak awal. Seluruh data yang diminta sudah dipinda dan dikirim agar proses audit lebih efisien.

Saat ini, Kejari Kukar masih menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP. Hasil audit inilah yang akan menentukan arah penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.

"Sampai saat ini belum ada permintaan tambahan lagi, tinggal menunggu dari BPKP. Kita sudah bersurat ke BPKP, sekarang posisinya hanya menunggu," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i